

ISSN : 0126-396X

# Dialog

Vol. 72, No. 2, Tahun. XXXIV, Nopember 2011

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

## Pasang Surut Politik Islam

Jurnal Dialog	Nomor 072	Tahun XXXIV	Halaman 150	Jakarta Nop 2011	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011

Terakreditasi C No:  
362/AU1/P2MBI/07/2011  
ISSN : 0126-396X

**Pemimpin Umum:**

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.

**Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:**

DR.H.M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

H. Wahyudi, S.Pd.

**Sekretaris Redaksi:**

Hj. Astuti Nilawati, S.Pd.

**Mitra Bestari:**

1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, M.A.
2. Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, M.A.
3. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar
4. Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah

**Dewan Redaksi:**

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Dr.H. Imam Tholkhah
3. Drs. H. Muhammad Shohib, M.A.
4. Drs. Choirul Fuad Yusuf, SS, M.A.
5. H. Chamdi Pamudji, SH, MM.
6. Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc.

**Redaktur Eksekutif:**

M. Nasir, S.Th.I

**Redaktur Pelaksana:**

1. Abas Jauhari, MSI.
2. Umu Rahmah

**Administrasi:**

1. Mulyadi Azwan
2. Dra. Hj. Aini Moerad
3. Willa Widdharari, S.Kom.

**Alamat Redaksi:**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Gedung Kementerian Agama  
Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat  
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380  
Website: www.Balitbangdiklat.kemenag.go.id

---

## PENGANTAR REDAKSI

---

### PASANG SURUT POLITIK ISLAM

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, dan mengalami pasang surut. Politik identitas yang coba ditampilkan oleh umat Islam melalui perwakilan tokoh-tokohnya mengalami kekalahan, di antaranya ketika tujuh kata dalam piagam Jakarta dihapus. Meskipun begitu keberhasilan politik Islam pada pemilu pertama menunjukkan prestasi yang cukup baik dengan tercatat sebagai partai pemenang kedua (Masyumi) dan ketiga (NU) setelah PNI. Namun keberhasilan yang ditunjukkan umat Islam pada pemilu tahun 1955 rontok pada masa Presiden Soekarno dengan penerapan Demokrasi Terpimpinnya. Apalagi setelah tokoh-tokoh penting

---

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, intelektual dan akademisi untuk mengkomunikasikan gagasan secara ilmiah dan kreatif bagi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia

---

partai Masyumi dipenjarakan oleh sang presiden, keperkasaan politik umat Islam sedikit memudar.

Gerakan reformasi pasca berakhirnya orde baru telah mengubah wajah perpolitikan Indonesia, demikian pula perpolitikan umat Islam. Kondisi negara yang cenderung tidak setabil menuntut berbagai pihak merasa perlu untuk mendesakkan demokrasi, kebebasan, transparansi, akuntabilitas publik, atas persoalan-persoalan bangsa, berkaitan dengan seluruh tatanan masyarakat. Tak ayal pertentangan dan konflik sosial terus terjadi. Berbagai kepentingan, baik yang mendasari atas nama bangsa dan kelompok tertentu, juga ikut mewarnai.

Terbukanya kran kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berserikat menjadi salah satu pendorong menguatnya gerakan masyarakat sipil. Di satu sisi, gerakan ini menjadi harapan karena mampu mendorong dan menjadi stabilisator pemerintahan, namun di saat yang lain semakin mengancam. Kegetiran masyarakat atas berbagai persoalan terutama dalam hal ekonomi, politik, dan degradasi moral menjadikan masyarakat mencari alternatif baru.

Salah satunya adalah munculnya berbagai pemikiran politik Islam yang kemudian melahirkan banyak gerakan. Konsolidasi di tingkatan negara terus dilakukan, namun pada saat yang sama, terdapat konsolidasi internal di kalangan umat Islam. Eksistensi Islam politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi pernah dianggap sebagai pesaing yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan

domestikasi terhadap gerak ideologis politik Islam. Sebagai hasil dari kebijakan semacam ini, bukan saja para pemimpin dan aktifis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau agama negara. Tetapi mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik "minoris" atau "outsider". Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai sebagai anti ideologi Negara Pancasila. Gejala menurunnya ketegangan hubungan antara Islam dan Negara mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-kebijakan tersebut berspektrum luas.

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia telah menimbulkan perdebatan tersendiri. Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena itu dinilai sebagai perwujudan dari hadirnya kembali politik Islam, atau ada yang mengistilahkan sebagai "repolitikasi Islam". Ketika berhadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam seringkali dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Jurnal Dialog vol. 72 XXXIV, 2011 ini mencoba menyoroti Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan M. Firdaus

Khalimi tentang *Memahami Politik Masyarakat Muslim*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Himawan Sutanto, yang menulis tentang *Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting?* Sedangkan Miftahussurur menghadirkan tulisannya tentang *Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia*. Ifa Avianty dan Thobib Al-Asyhar menghadirkan tulisan tentang *Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa*. Edisi ini kian menarik dengan hadirnya tulisan Herdi Sahrasad tentang *Reformasi Mesir: Berkaca pada Indonesia?* dan Ihsan Ali-Fauzi yang menghadirkan tulisan tentang *"Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi'ah*. Kajian semakin lengkap dengan hadirnya tulisan Abdul Waid tentang *Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas: Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama hingga Era Orde Reformasi*.

Pada edisi ini juga dihadirkan kajian Ismatu Ropi tentang Rohis: *Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama*, dan tulisan Nursh Shalihin Djamra tentang *Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang berjudul *Negara Islam* karangan Musdah Mulia. Buku ini secara umum mengurai dan mengulas pemikiran Haikal tentang negara Islam. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam kajian politik Islam, khususnya di Indonesia. Selamat Membaca!

**Redaksi**

# DAFTAR ISI

---

## TOPIK

---

### **FIRDAUS KHALIMI**

Memahami Politik Masyarakat Muslim — 1

### **MUHAMMAD HIMAWAN SUTANTO**

Kegagalan Partai Politik Islam : Kegagalan Agenda Setting ? — 12

### **MIFTAHUSSURUR**

Pasang Surut dan Fragmentasi Politik Islam di Indonesia — 26

### **IFA AVIANTY DAN THOBIB AL-ASYHAR**

Perubahan Paradigma Peran Politik Pemuda Islam Indonesia dari Masa Ke Masa — 44

### **HERDI SAHRASAD**

Reformasi Mesir : Berkaca pada Indonesia? — 63

### **IHSAN ALI FAUZI**

Paradigma Karbala dan Protes Politik Kaum Syi`ah — 83

### **ABDUL WAID**

Populisme Akar Ketahanan Politik Identitas : Refleksi Pasang Surut Politik Islam dari Era Orde Lama Hingga Era Orde Reformasi — 97

## PENELITIAN

---

### **ISMATU ROPI**

Rohis: Dari Pencarian Identitas ke Ideologisasi Agama — 114

### **NURUS SHALIHIN DJAMRA**

Rasionalisasi Agama dalam Arena Politik: Dari Pilihan Ideologis ke Pertimbangan Rasional — 126

## BOOK REVIEW

---

### **MEILANI DEWI**

Mengurai Pemikiran Haikal tentang Negara Islam — 140

## RASIONALISASI AGAMA DALAM ARENA POLITIK: DARI PILIHAN IDEOLOGIS KE PERTIMBANGAN RASIONAL

OLEH: NURUS SHALIHIN DJAMRA<sup>1</sup>

---

### ABSTRAK

*This article describes the presence of Islamic party in West Sumatera resulting new dynamics in social and political structure of Minangkabau ethnic. Hence, muslims have boosted the strong and clean democracy because of their participation in politics particularly in 2004-2009 legislative election. Surprisingly, Islam is not always correlated with political choice. Eventhough the most population in West Sumatera is Islam, but their political choice is not always Islamic parties. The lose of Islam politics (Islamic Parties) in legislative election was the fact. This was seemingly because of shifting paradigm of constituent, from ideological consideration to rational consideration, from identity politics to national politics.*

Artikel ini menggambarkan kehadiran partai Islam di Sumatera Barat yang menghasilkan dinamika dalam struktur sosial dan politik etnik Minangkabau. Oleh sebab itu, umat Islam di sana mampu mendorong demokrasi yang kuat dan bersih dalam pemilihan legislatif 2004-2009. Yang mengejutkan adalah, ternyata Islam tidak selalu berkorelasi dengan pilihan politik. Meskipun mayoritas populasi di Sumatera Barat adalah Islam, pilihan politik mereka tidak selalu jatuh pada partai-partai muslim. Kalahnya politik Islam (partai-partai Islam) pada pemilihan legislatif merupakan buktinya. Hal ini tampaknya diakibatkan oleh pergeseran paradigma konstituen, dari pertimbangan ideologi ke pertimbangan rasional, dari politik identitas ke politik kebangsaan.

### Kata-kata kunci:

*Islam, partisipasi politik, partai Islam, pilihan politik.*

---

<sup>1</sup> Dosen Sosiologi dan Peneliti pada Pusat Kajian Sosial dan Kebijakan Publik (PKSKP) IAIN Imam Bonjol Padang.

Di Sumatera Barat, Islam dan Minang menjadi agama dan etnik mayoritas penduduknya<sup>1</sup>. Minang sebagai etnis mayoritas dan Islam sebagai agama mayoritas, keduanya memiliki hubungan mutual-simetris<sup>2</sup>. Jika demikian adanya, apakah kekuatan Islam di Sumatera Barat memiliki korelasi dengan pilihan politik umat Islam? Pertanyaan ini cukup relevan diajukan mengingat secara teoritik setiap perilaku sosial apapun namanya tidak menempati ruang hampa; perilaku selalu saja berkaitan dengan motivasi dan nilai. Meminjam istilah Freud (Fromm, 2000:47-48) bahwa kekuatan jiwalah yang menentukan perilaku, dimana karakter dari kekuatan jiwa tersebut berciri bawah-sadar, dan dari kesadaran itulah yang

---

<sup>1</sup>. Dari 4,827,973 juta penduduk Sumatera Barat sekitar 98,04% beragama Islam, 0,94% Protestan, 0,83% Katolik, 0,14 Budha, 0,04% Hindu, dan 0,01% lainnya. Sementara dari 4,241,256 populasi penduduk Sumatera Barat tahun 2000 persentase etnis Minang berkisar 88,35%, Jawa, 4,15%, Mandailing, 3,01%, Batak, 1,41%, Mentawai, 1,28%, Melayu, 0,51%, Cina 0,35%, Sunda, 0,26%, dan lainnya 0,66%, yang tersebar pada sembilan belas (19) kabupaten dan kota. Lihat BPS dan Kakanwil Depag Prov. Sumbar

<sup>2</sup>. Setiap orang Minangkabau sudah pasti dan otomatis beragama Islam. Artinya tidak ada pilihan lain bagi orang Minangkabau selain memilih Islam sebagai agamanya. Sebab berlangsungnya secara baik proses akulturasi antara Islam dengan Adat di Minangkabau tidak saja melahirkan formulasi baru dunia keminangkabauan orang Minang, akan tetapi Islam bagi mereka bukan saja dilihat sebagai agama, lebih jauh lagi, Islam dimaknai sebagai identitas kultural dan sosial yang membedakan mereka dengan orang lain. Sebagai identitas kultural, Islam adalah unsur penentu keabsahan keminangkabauan seseorang, sementara sebagai identitas sosial, Islam menjadi paradigma, atau paling tidak menjadi referensi utama ke arah mana kehidupan sosial mestinya diorientasikan. Secara empiris, studi Muhammad Sobari memperlihatkan bahwa Islam adalah salah satu dari tiga (berdagang dan tradisi merantau) pembentuk identitas Minangkabau. Menurut Sobary, Islam, berdagang, dan tradisi merantau adalah identitas orang Minangkabau.

kemudian menentukan arah dan tujuan dari sebuah perilaku. Artinya perilaku bukanlah suatu reaksi spontan atau naluriah manusia semata, tetapi ia lahir dari kedalaman kesadaran yang didorong oleh berbagai motif. Dalam bahasa lain perilaku sebenarnya bukan semata-mata bersifat ekspresif, melainkan lebih bersifat instrumental, memiliki intensi dan berhubungan erat dengan sistem nilai; apakah sistem nilai itu budaya ataupun agama. Dalam konteks ini, agama sebagai sebuah sistem nilai dan norma sejatinya menjadi kekuatan untuk mempolakan dan meorientasikan intensi perilaku sosial.

Jika alur logika ini diterima, maka agama terutama Islam sudah barang tentu memiliki korelasi positif dengan politik, sebab Islam sebagai sebuah sistem nilai dan makna telah turut mempolakan, meorientasikan dan membentuk sikap hidup para penganutnya. Meminjam istilah Geertz (Azwar, 1997:30) pengaruh agama terhadap politik dapat dilihat dari sifat agama itu sendiri, yakni sebagai sebuah sistem simbol yang membentuk kegairahan dan motivasi yang kuat, besar dan berjangka panjang pada kehidupan manusia. Dari sisi ini dapat dijelaskan bahwa ada hubungan antara agama dengan politik karena politik itu sendiri pun juga sangat berkaitan dengan kegairahan, motivasi dan kepentingan manusia. Jika asumsi teoritik ini menemukan pembenarannya, maka dalam realitasnya tentu pilihan politik umat Islam di Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi dan ditentukan Islam. Benarkah demikian?

## Politik dan Agama: Bukan Dua Sisi Mata Uang

Relatif tingginya tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat yang mayoritas pemilihnya umat Islam menunjukkan bahwa umat Islam di Sumatera Barat memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan demokrasi<sup>3</sup>. Ini, selain menggambarkan bahwa umat Islam menerima demokrasi sebagai sistem politik, sekaligus juga membantah argumen bahwa demokrasi akan mengalami kegagalan dalam dunia muslim disebabkan antara lain demokrasi tidak sejalan dengan Islam, watak budaya dan masyarakat Islam yang tidak ramah terhadap konsep-konsep liberalisme Barat seperti tuduhan Huntington (1997), Elie Kedoure (1992), Bernard Lewis (2002) dan lain-lain. Jika demikian, maka persoalannya adalah apakah diterimanya demokrasi oleh umat Islam di Sumatera Barat atas pemaknaan bahwa antara Islam dan politik bukanlah dua kutub yang dikotomis; Islam adalah ranah transendental sementara politik adalah dunia profan? Atau memang atas kesadaran bahwa ber-Islam bagi mereka bukanlah bagaimana mengislamkan negeri mereka tapi membumikan pesan Islam itu sendiri.

Apabila alur pikir pertama diterima; Islam dan politik adalah satu bagian yang utuh dengan asumsi bahwa

---

<sup>3</sup>. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif tahun 2004 dan 2009 menunjukkan hal yang positif, dimana persentase antara yang menggunakan hak pilihnya relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat Golput; 75,56% menggunakan hak pilih, dan 24,44% yang Golput, sedangkan pada pemilu 2009, 70,46% menggunakan hak pilih dan 29,54% Golput Laporan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 dan 2009

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali dengan politik, maka sudah barang tentu Islam sebagai sebuah sistem nilai tidak saja mempengaruhi, bahkan sangat menentukan perilaku politik umat Islam. Meskipun Islam dan partisipasi politik di Sumatera Barat memiliki relasi positif, namun tidak serta merta bahwa partisipasi politik mereka telah merepresentasikan sikap keberagamaan. Karena partisipasi politik dalam bentuk menggunakan hak pilih seringkali lebih bersifat ekspresif<sup>4</sup> daripada instrumental<sup>5</sup>. Studi Saiful Mujani (2007) memperlihatkan bahwa partisipasi umat Islam di Indonesia khususnya dalam memberikan hak suara bukanlah didasarkan atas orientasi agama, melainkan sebagai sebuah ekspresi dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara<sup>6</sup>. Dalam bahasa lain menggunakan hak pilih dalam pemilu lebih merepresentasikan rasa nasionalisme dan komitmen kebangsaan mereka sebagai warga negara daripada merepresentasikan komitmen keberagamaan.

---

<sup>4</sup>. Memberikan hak suara dalam pemilu merupakan ekspresi diri, misalnya untuk mendefinisikan siapa diri mereka, dianggap sebagai warga negara demokratis dan mungkin juga untuk menghindari sanksi sosial.

<sup>5</sup>. Menggunakan hak suaranya dalam pemilu didorong oleh keinginan bahwa mereka memberikan hak suaranya untuk memilih wakil rakyat, memilih pimpinan atau meningkatkan kondisi ekonomi, keamanan dan lain sebagainya.

<sup>6</sup>. Studi Saiful Mujani menunjukkan 42% orang yang memberikan hak suara dalam pemilu 1999 didasarkan atas pemenuhan tugas mereka sebagai warga negara, 20% menggunakan hak pilih karena mereka memandang memberikan suaranya dalam pemilu merupakan hak mereka sebagai warga negara, dan 7% mereka menggunakan hak suaranya karena orang lain juga melakukannya. Lebih jauh lihat Mujani, 2007, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, hal, 280-282.



Jika demikian, apakah memilih merupakan sebuah kesalahan religius, dimana umat Islam menjadikan segala hal yang epistruktur atau apapun yang dilekatkan secara generatif pada Islam, dipandang sebagai kesalahan? Sepertinya, memilih bukanlah sebuah kesalahan, melainkan hanyalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Umat Islam di Sumatera Barat berkeyakinan bahwa memberikan hak suara adalah tanggung jawab sebagai warga negara, bukan karena merepresentasikan sikap keberagamaan<sup>7</sup>. Kendati MUI ataupun hadirnya Islam politik mungkin mewarnai konstelasi politik lokal, tetapi masyarakat memaknai tindakan ataupun pilihan politik mereka bukanlah ekspresi dari kesalahan beragama. Pada sisi yang bersamaan, jika saja agama (Islam) berkorelasi positif dengan partisipasi politik, maka tentu saja partai berbasis (ideologi dan massa) Islam menjadi referensi utama bagi umat Islam dalam menentukan pilihan politik mereka. Argumen yang dapat diajukan adalah bahwa kemenangan suatu partai

---

<sup>7</sup>. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang diberikan responden terhadap faktor dan alasan mengapa mereka memilih memperlihatkan bahwa *pertama*, 45,08% menjawab alasan mereka menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif 2009 adalah karena menggunakan hak pilih dilihat sebagai hak dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara. *Kedua*, 16,67% memberikan suara pada pemilu sebagai momentum untuk mengekspresikan eksistensi diri mereka sebagai warga negara yang baik dan demokratis. *Ketiga*, 3,79% menggunakan hak pilihnya sebagai tujuan menghindari sanksi sosial. *Keempat*, 6,06% memberi alasan karena ikut-ikutan. *Kelima*, 14,77% memberikan suaranya untuk memilih pemimpin, dan menghendaki negara ini berjalan secara baik. *Kelima*, 7,95% menggunakan hak pilih merupakan tanggungjawab sebagai seorang muslim dan umat beragama. Dari temuan lapangan di atas terlihat jelas betapa agama tidak memberi pengaruh terhadap pilihan politik umat Islam.

Islam dalam sebuah kontestasi politik sangat ditentukan oleh seberapa besar jumlah konstituen yang beragama Islam: semakin besar konstituen yang beragama Islam di suatu daerah, maka semakin besar peluang partai yang berbasis Islam memenangkan kontestasi politik. Benarkah asumsi ini mendapatkan "justifikasi" empirik di Sumatera Barat?

Hasil pemilu legislatif 2004 dan 2009 dapat dijadikan alat ukur betapa sebenarnya agama (Islam) tidak selalu berkorelasi dengan pilihan politik umatnya<sup>8</sup>. Apalagi jika asumsi di atas, diuji dengan data pemilu legislatif 2009, semakin kelihatan tidak berbanding lurusnya antara Islam dengan pilihan politik umatnya. Jika pada pemilu 2004 partai Islam mampu memenangkan 44 kursi (8.00%), maka tidak demikian halnya pada pemilu 2009. Kontestasi politik pada pemilu 2009, partai Islam mengalami kekalahan telak, dan hanya mampu memperoleh 241 kursi (43.82%) dari 610 kursi yang diperebutkan di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Partai Islam bukan saja tidak mampu mempertahankan suaranya

---

<sup>8</sup>. Di Sumatera Barat mayoritas konstituen adalah etnik Minangkabau (88.35%) dan beragama Islam (98.04%), namun besarnya jumlah konstituen beragama Islam tidak berbanding lurus dengan pilihan politik mereka, justru partai nasionalis lebih menjadi pilihan utama bagi umat Islam dibanding dengan partai berbasis Islam. Data pemilu legislatif 2004 dan 2009 cukup representatif dijadikan alasan untuk tesis ini. Meskipun pencapaian partai berbasis Islam pada pemilu legislatif 2004 dapat memenangkan kontestasi politik dengan memperoleh 327 kursi (54.05%) dari 605 kursi yang diperebutkan (550 kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota, dan 55 kursi untuk DPRD Provinsi), sementara partai nasionalis memperoleh 249 kursi (40.82%). Akan tetapi dengan selisih 44 kursi (8.00%), kemenangan partai Islam tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan rasio jumlah pemilih yang mayoritas beragama Islam (98.04%).

yang diperoleh pada pemilu 2004, justru mereka harus kehilangan 27 kursi pada pemilu legislatif 2009. Data ini mengandaikan ada titik balik; sebuah rasionalisasi yang cukup intens terhadap partai Islam. Hal ini kian menguat ketika fakta di lapangan memperlihatkan kekalahan partai berbasis Islam antara pemilu legislatif 2004 dengan pemilu legislatif 2009. Pada pemilu legislatif 2004, partai Islam memperoleh suara yang cukup signifikan 32 kursi (58.18%), sebaliknya pada pemilu legislatif 2009, partai Islam pun mengalami kekalahan yang juga sangat signifikan; partai Islam hanya mampu meraih 20 kursi (36.36%) dari 55 kursi yang diperebut untuk DPRD Provinsi<sup>9</sup>.

### **Islam dan Pilihan Politik: Antara Keyakinan Ideologik dan Pilihan Pragmatik**

Menguatnya Islam politik pasca reformasi bergulir merupakan konsekuensi dari meluasnya skala Islam di Indonesia. Ini tidak saja menyebabkan perubahan dan transformasi kehidupan keberagamaan, tetapi juga telah merubah struktur dan corak sosial. Kondisi ini sangat terasa di Sumatera Barat ketika prosesi demokrasi dilangsungkan. Faktanya, Pilpres ataupun Pileg menjadi ranah bagi Islam politik bertumbuh dan merebut kepercayaan umat Islam. Apakah Islam politik (partai Islam) mampu merebut kepercayaan umat Islam terutama bagi etnik Minangkabau? Pengaruh Islam dengan pilihan politik, bukanlah bersifat positif

ataupun negatif. Dikatakan positif, jika Islam dipersepsi sebagai faktor yang mempengaruhi pilihan politik, dan sebaliknya, pengaruh negatif, ketika Islam sama sekali tidak mendorong pilihan politik terhadap partai Islam. Meskipun bagi etnik Muslim Minangkabau di Sumatera Barat Islam adalah satu dari pilar penting pembentuk karakter dan identitas kultural, namun tidak niscaya menjadi kekuatan satu-satunya yang mampu mendorong pilihan politik mereka terhadap partai Islam. Tidak hanya rasionalitas karena ikatan primordial, seperti Islam, tetapi nalar lain pun turut mempengaruhi pilihan mereka terhadap partai politik. Transformasi atas pergeseran ini agaknya penting dilihat secara empirik, dan dipahami dalam bingkai teoritik mengapa pergeseran ini terjadi. Lalu bagaimana umat Islam melihat relasi agama dengan politik? Apakah agama dan politik memiliki relasi positif atau sebaliknya, agama dan politik adalah dua hal yang terpisah?

Bangkitnya Islam pasca reformasi di Indonesia bukan sekedar rasionalisme dan modernisme, tetapi juga menyangkut demokrasi. Salah satu kebangkitan Islam berkaitan dengan demokrasi adalah menguatnya Islam politik yang ditandai dengan bermunculan berbagai partai politik berbasis agama dalam kehidupan politik di Indonesia. Persoalannya, apakah Islam politik berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat? Bagi pemilih Muslim di Sumatera Barat agama dan politik memiliki relasi yang positif; agama tidak saja dimaknai sebagai sistem kepercayaan dan ritual tertentu seperti shalat, puasa dan sebagainya, lebih dari itu agama dipahami sebagai hal yang sosial

---

<sup>9</sup> Data ini diolah dari laporan perolehan suara dan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 dan 2009.

termasuk politik. Sederhananya, politik bukanlah bagian yang terpisah dari kehidupan agama.

Agama memberi landasan nilai dan etis pada politik, dan sebaliknya agama menjadi kuat apabila ditopang oleh kekuatan politik. Atas dasar pandangan inilah agaknya mengapa masyarakat melihat agama menjadi niscaya terlibat dalam arena politik. Relasi agama dengan politik dapat diidentifikasi melalui sejumlah realitas. *Pertama*, keterlibatan agama dalam proses demokrasi. Pemilih Muslim Sumatera Barat berkeyakinan agama menjadi penting terlibat dalam memperkuat demokrasi<sup>10</sup>. *Kedua*, keterlibatan agama dalam politik praktis. Mayoritas pemilih menginginkan keterlibatan agama dalam politik praktis<sup>11</sup>. *Ketiga*, perlunya partai berdasarkan agama. Pemilih Muslim berpandangan bahwa keberadaan partai berbasis agama sangatlah penting dalam mendorong proses demokratisasi di Indonesia<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>. Hal ini diperlihatkan 55,68% pemilih yang setuju agama terlibat dalam proses demokrasi, dan 22,73% yang tidak setuju. Dari lima kluster pemilih (petani; buruh; PNS; pedagang; dan elit), maka elit lebih tinggi tingkat kesetujuannya melibatkan agama dalam proses demokrasi 65,22% setuju, dan 30,43% tidak setuju. Diiringi dengan pedagang (60,98% setuju, 41,46% tidak setuju), petani (52,59% setuju, dan 20,69% tidak setuju), buruh (50,00% setuju, dan 22,22% tidak setuju), dan PNS (50,00% setuju, dan 30,56% tidak setuju).

<sup>11</sup>. 45,83% menginginkan keterlibatan agama dalam politik praktis, dan 38,20% yang tidak menginginkan agama terlibat dalam politik praktis. Buruh adalah pemilih yang menghendaki agama terlibat dalam politik praktis dengan kisaran 55,56% setuju, dan 22,22% tidak sepakat melibatkan agama dalam politik praktis. Berturut-turut diikuti pedagang (51,22% setuju dan 41,46% tidak setuju), elit, (43,48% setuju, dan 30,43% tidak setuju), petani (38,79% setuju dan 28,45%). Sementara PNS adalah pemilih yang tidak menginginkan agama terlibat dalam politik praktis (38,89% setuju, dan 50,00% tidak setuju).

<sup>12</sup>. 73,11% pemilih berpandangan bahwa dalam proses demokratisasi keberadaan partai berbasis

*Keempat*, kemestian memilih partai Islam dalam pemilu. Ada kerunutan antara keterlibatan agama dengan demokrasi, politik praktis, dan perlunya partai berdasar agama dengan tindakan praktis, yakni memilih partai agama dalam kontestasi politik<sup>13</sup>.

Fakta di atas mengandaikan sebuah realitas, dimana tidak terjadi sekularisasi antara agama dan politik dalam kehidupan masyarakat. Ini menandakan sebuah pertanyaan, "jika agama dan politik memiliki korelasi positif; apakah hubungan tersebut dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat?" Meskipun, hadirnya Islam politik, ternyata tidak otomatis membuat umat Islam "silau mata" dan memilih partai Islam tanpa pertimbangan rasional. Kalahnya partai Islam dalam kontestasi pemilu legislatif 2009 adalah bukti bahwa agama kurang determinan dalam menentukan pilihan politik. Pertanyaannya adalah mengapa hal itu bisa terjadi; lalu bagaimana sesungguhnya bentuk hubungan agama dengan politik?

---

agama sangatlah penting, hanya 9,09% yang tidak setuju adanya partai berdasarkan agama. Berbeda dengan keterlibatan agama dalam demokrasi dan politik praktis, semua kategori pemilih mengapresiasi lebih dalam soal perlunya partai berbasis agama. Yang paling tinggi tingkat apresiasinya adalah pedagang (85,37% setuju, dan 12,20% tidak setuju), diikuti elit (82,61% setuju, dan 8,70% tidak setuju), PNS (69,44% setuju, dan 19,44% tidak setuju), petani (68,10% setuju, dan 4,31% tidak setuju), dan buruh (66,67% setuju, dan 11,11% tidak setuju).

<sup>13</sup>. 62,12% pemilih melihat bahwa pemilu legislatif merupakan sarana untuk memilih partai Islam, dan 28,41% yang menyatakan pemilu legislatif tidak mesti memilih partai Islam. Pedagang adalah pemilih yang paling tinggi tingkat kesetujuannya (65,85% setuju, dan 29,27% tidak setuju), diikuti petani (62,93% setuju, dan 25,86% tidak setuju), buruh (61,11% setuju, dan 33,33% tidak setuju), PNS (47,22% setuju, dan 41,66% tidak setuju), dan elit (43,48% setuju, 43,48% tidak setuju).

Mencermati hubungan antara Islam dan politik di Indonesia dapat dikatakan bukanlah hubungan yang bersifat afinitas-integratif, melainkan hubungan kohesi-dialektik yang saling menguatkan. Ini adalah corak dari hubungan dua entitas yang berbeda, sama berbedanya antara Islam dan negara. Meminjam pandangan Jalaluddin Rahkmat, Islam di Indonesia, bukanlah Islam *wasathan wahidah*, bukan Islam yang satu padu. Pikiran mereka mungkin saja bersatu, tetapi tidak dengan hati mereka<sup>14</sup>. Meskipun Islam politik hadir dengan simbol-simbol Islam, tetapi tidak cukup kuat mempengaruhi pilihan politik (memilih partai Islam).

Runtuhnya Orde Baru membawa wajah baru dalam perpolitikan bangsa. Sistem politik yang dulunya tidak memberi ruang kepada publik menentukan pilihan politiknya kecuali apa yang telah ditentukan negara. Pasca Orde Baru sistem politik pun berubah dari politik sentralisme ke politik desentralisme; dari politik despotik ke politik demokratis. Perubahan sistem politik, ternyata memberi efek pada tingkat lokal. Salah satunya menguatnya semangat politik identitas; agama, suku, daerah dan sebagainya. Kuatnya politik identitas

dapat diidentifikasi dari munculnya berbagai politik aliran, di antaranya partai politik berideologi agama. Sejak pemilu legislatif 1999 sampai pemilu 2004 politik identitas mendapat respon positif, namun pada pemilu 2009 politik identitas agaknya sudah mulai usang dan berganti baju dengan politik primordial. Di Sumatera Barat, pemilih tidak lagi mempertimbangkan ideologi sebuah partai dalam menentukan pilihan politik mereka. Kuatnya PAN pada pemilu 1999, dan munculnya PKS dan PBB sebagai kekuatan pada pemilu legislatif 2004 dapat diidentifikasi diterimanya politik identitas, tetapi pada pemilu 2009 politik identitas kurang mendapat tempat di hati masyarakat.

Menangnya partai Islam pada 2004 dan kalahnya partai Islam pada pemilu legislatif 2009 adalah bukti betapa politik aliran mulai tidak laku. Sepertinya politik identitas merubah wajahnya ke politik primordial. Ikatan kekeluargaan, suku dan daerah kini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politik<sup>15</sup>. Pergeseran ini tidak muncul begitu saja tanpa ada kekuatan yang menstimulasi bergesernya politik identitas ke politik primordial. Salah satu faktor yang mendorong adalah perubahan konfigurasi sistem pemilu "kolektif-partai" (nomor urut) ke sistem "individual-personal" (suara terbanyak). Perubahan sistem pemilu

---

<sup>14</sup>. Tidak mengherankan hubungan Islam di sepanjang sejarah Islam nusantara adalah hubungan politik, ideologik hingga pada akhirnya melahirkan kutub-kutub Islam yang saling berbeda, seperti Islam tradisional, Islam modernis, dan Islam fundamentalisme. Ini kemudian tidak saja berimplikasi bagaimana umat Islam memandang Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai nalar politik. Hadirnya Islam politik misalnya, tidak hanya mengukuhkan Islam telah menjadi sumber baru bagi perpolitikan praktis, tetapi juga menjadi medan magnet yang bisa menarik partisipan terhadap Islam politik. Bandingkan Rizal Sukma, *Islam in Indonesia Foreign Policy*, (New York: Routledge), 2003, hal. 22.

---

<sup>15</sup>. Pemilih mengakui ikatan primordial menjadi kekuatan dalam menentukan pilihan politik. 66,01%, pemilih memilih caleg karena ada ikatan primordial, dan 18,56% yang memilih caleg tidak berdasarkan ikatan primordial. Gambaran lengkap dapat dilihat sebagai berikut; PNS (61,11%), Petani, (63,79%), Pedagang, (63,41%), Buruh (88,89%) dan Elit (60,87%) setuju mempertimbangkan ikatan primordial, di luar agama sebagai pertimbangan pilihan politik.

2009 yang menempatkan kekuatan personal caleg dengan sendirinya menggeser kekuatan partai sebagai episentrum<sup>16</sup>. Meskipun tidak begitu signifikan, namun banyak pemilih yang cenderung memilih caleg, jika pun ada yang memilih partai itu lebih disebabkan karena tidak ada caleg yang mereka kenal.

Tidak hanya kekuatan primordial yang tumbuh dalam arena politik pasca reformasi, uang pun menjadi kekuatan penggerak politik. Ini adalah resiko demokrasi liberal, sebuah demokrasi yang bertumpu pada “kebebasan” individual, dan intensitas aktualitas diri secara berlebihan. Tidak disadari, kebebasan itu membuka ruang yang begitu besar masuknya “kekuatan uang” sebagai mesin sosial yang menggerakkan politik dan demokrasi. Tidak saja menjadi mesin yang mampu memproduksi realitas, lebih dari itu, uang telah menjadi fenomena sosial. Meminjam pandangan Frances Hutchinson (2002: 211), uang kini tidak lagi murni dan konsisten digunakan dalam bentuk primitifnya dan naturalistik, melainkan telah menjadi kekuatan yang mampu memproduksi struktur sosial. Meskipun Marx (Hutchinson, 2002: 211) berpandangan, uang tidak akan bermakna sosial tanpa

---

<sup>16</sup>. Data lapangan menunjukkan pemilih memberikan suaranya bukan lagi kepada partai, melainkan kepada caleg. Hal ini tergambar 46,59% pemilih yang memilih caleg, dan 41,67% yang memilih partai. Persentase berikut ini dapat menggambarkan kondisi tersebut; Patani adalah pemilih yang paling banyak memilih caleg ketimbang partai (60,34% memilih caleg, dan 25,86% memilih partai). Diiringi buruh 61,11 memilih caleg, dan 33,33% memilih partai. Elit, 56,52% memilih caleg, dan 26,09% memilih partai. Sedangkan PNS lebih memilih partai dibanding caleg (72,22% memilih partai, dan 13,89% memilih caleg), diikuti oleh pedagang (70,73% memilih partai, dan 19,51% memilih caleg.)

nilai komoditasnya, tetapi uang kini malah menjadi pemberi makna dalam kehidupan sosial. Pandangan Marx kian memudar ketika uang menjadi satu-satu mediasi; instrumen yang paling “sakti” mewarnai kehidupan sosial.

Berkenaan dengan ini, bukan hal yang aneh, tetapi ironis agaknya ketika uang dijadikan “daya tarik” politik. Ini melahirkan sebuah fenomena yang ironis di Indonesia, *money politic*; sebagai gambaran dari menguatnya peran uang dalam menarik dan mempengaruhi kepercayaan konstituen. Politik dalam kondisi ini disimpangkan dari makna terbaiknya sebagai prosesi mengaktivir daya kolektif masyarakat. Di bawah kekuatan uang, makna politik mengalami pengkerutan menjadi sekadar wahana menggapai kekuasaan dan media pelepasan hasrat berkuasa. Memang dalam tataran teoritis, demokrasi lebih kuat dibanding uang, namun dalam praksisnya, justru yang terjadi malah sebaliknya. Demokrasi tidak berdaya di bawah cengkraman kekuatan uang, bahkan demokrasi tunduk dalam “permainan” yang diciptakan uang; sebut saja, fenomena transaksional kekuasaan hingga jual beli suara. Ini menandakan dengan tegas bahwa demokrasi tunduk di bawah daya yang diciptakan uang. Di Sumatera Barat kelihatannya uang tidak saja menentukan terpilihnya seseorang, lebih dari itu uang juga ikut mempengaruhi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan mereka<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>. Walaupun kekuatan uang tidak terlalu besar pengaruhnya (+37,21% dan -27,65%) dalam menentukan pilihan politik masyarakat dibanding dengan pengaruh uang dalam menentukan terpilihnya seseorang (+54,92% dan -26,98%), namun tetap saja uang memegang peranan penting dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Selain agama, ikatan primordial dan uang, kapabilitas dan kinerja adalah kekuatan penggerak demokrasi. Sepuluh tahun sudah bangsa ini belajar berdemokrasi; tiga kali pemilu legislatif dan dua kali pemilu presiden/pemilihan kepala daerah. Ternyata masyarakat makin hari, kian dewasa, cerdas dan rasional dalam berpolitik. Salah satu acuan menilai apakah masyarakat dewasa dalam berpolitik dapat dilihat atas pertimbangan atau alasan apa ia menentukan pilihan politik. Ada beberapa bentuk rujukan yang dijadikan rakyat menentukan pilihan politik. *Pertama*, pertimbangan rasional dan pertimbangan irrasional. Pertimbangan rasional berlaku ketika pemilih melihat rekam jejak, *track record*, ataupun kinerja dan program yang ditawarkan. Pertimbangan irrasional merupakan pertimbangan yang hanya berdasarkan faktor kekerabatan, agama, kewilayahan atau etnis. *Kedua*, pertimbangan ideologi, dimana kejelasan ideologi menjadi penentu bagi pemilih untuk menentukan pilihan politik mereka.

Dalam konteks ini, Firmanzah (2008) mengklasifikasikan pemilih kepada empat tipikal: pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih skeptis dan pemilih tradisional. Menurut Firmanzah pemilih yang mempertimbangkan alasan ideologi dalam menentukan pilihan adalah pemilih kritis, pemilih skeptis dan pemilih tradisional. Sedangkan pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihan politiknya atas pertimbangan kinerja dan program. Mengikuti alur pikir di atas, dapat dikatakan bahwa umat Islam sangat cerdas dan rasional dalam menentukan pilihan politik. Mengapa demikian? Temuan lapangan

menunjukkan bahwa umat Islam dalam pemilu legislatif 2009 dalam menentukan pilihan politik mereka didasari atas pertimbangan kapabilitas<sup>18</sup> dan kinerja<sup>19</sup>. Ini berarti, meskipun umat Islam berpandangan bahwa agama mesti terlibat dalam arena politik, dan agama menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik, namun ternyata agama tidak begitu dominan dalam mempengaruhi pilihan politik mereka.

### Reposisi Agama dalam Ranah Politik

Di atas telah dijelaskan bahwa masyarakat memahami agama adalah bagian penting dari politik, sehingga agama dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Kelihatannya ada yang paradoks; satu sisi umat Islam menghendaki agar agama terlibat dalam arena politik, dan di sisi lain mereka memperlihatkan ketidak-respekan terhadap partai Islam; lain keyakinan, lain pula pilihan. Apakah “keterjarakan” ini dapat dikatakan sebagai impuls dari Islam yang telah terlalu politis. Sebab menurut Mark Sedwick (2006) jika Islam masuk ke wilayah praktis, maka sisi oportunitas

---

<sup>18</sup>. 72,35% pemilih menyatakan pilihan politik mereka ditentukan oleh relasi dan kapabilitas caleg atau partai. Hanya 10,98% yang tidak menyatakan pilihan politik mereka dipengaruhi oleh relasi dan kapabilitas caleg/partai. Hal ini dialami secara merata pemilih; Elit (+82,61% dan -4,35%), buruh (+77,78% dan -16,67%) pedagang (+78,05% dan -14,63%) PNS (+75,00% dan -16,67%), dan petani (+64,66% dan -11,21%)

<sup>19</sup>. 62,12% pemilih mengakui kinerja menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pilihan politik mereka, dan 12,12% yang tidak terpengaruh dengan kinerja caleg atau partai. Elit (+78,26% dan -8,70%), pedagang (65,86% dan -17,07%) petani (+57,76% dan -10,34%), PNS (+55,56% dan -16,67%), dan buruh (+38,39% dan -11,11%).

dan pragmatisme lebih diperlihatkan ketimbang sisi terbaik Islam itu sendiri. Pandangan ini kelihatan menemukan kebenarannya bahwa Islam yang direpresentasikan oleh partai Islam sisi oportunis dan pragmatis kekuasaan lebih ditonjolkan, sehingga ideologi dan nilai-nilai yang seyogyanya melandasi sikap dan perilaku partai terabaikan. Ada keterjarakan antara “citra” dan “tindakan” yang dialami partai Islam. Artinya partai Islam tidak mampu menunjukkan bentuk dan perilaku ideal sesuai dengan bingkai Islam<sup>20</sup>. Pada kondisi inilah sesungguhnya proses menalar ulang antara agama dengan partai Islam berlangsung.

Keterjarakan antara citra dan tindakan telah mendorong sebuah pandangan “yang lain” atau transformasi persepsi yang terkadang tidak terduga. Meskipun umat Islam mempersepsi perlu melibatkan agama dalam arena politik, namun manakala mereka dihadapkan pada kenyataan politik, bahwa caleg/partai Islam tidak selalu sejalan dengan citra yang dipertontonkan, maka pada saat itulah semakin membesarnya keterjarakan antara keyakinan agama dengan pilihan politik. Dalam bahasa lain manakala partai Islam tidak lagi mampu berbuat dan bertindak sesuai dengan citra dan harapan umat Islam, maka pada saat itulah akan terjadi reposisi politik; sebuah upaya meletakkan posisi politik baru bagi partai Islam. Di Sumatera

---

<sup>20</sup>. Data menunjukkan perilaku partai Islam tidak mencerminkan perilaku Islam, dalam artian praktek dan sikap partai Islam tidak sesuai dengan tuntunan nilai, norma dan ajaran Islam. Rata-rata pemilih menyatakan perilaku partai Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam; Pedagang (+58,54% dan -31,71%), elit (+52,17% dan +34,78%), buruh (+50,00% dan -27,28%), PNS (+47,22% dan -8,33%), dan petani (+37,93% dan -36,21%).

Barat, sungguh inilah yang terjadi. Umat Islam mencari kembali partai politik yang lebih mampu memberikan harapan yang konkrit. Mereka tidak saja menilai, tetapi juga mengevaluasi secara kritis setiap partai politik. Dan ketika mereka menemukan bahwa partai Islam tidak lebih baik ketimbang partai Nasionalis, pada saat itulah partai Islam ditinggalkan. Mengikuti Max Weber (Jones, 2009) bahwa setiap manusia, jika mereka berorientasi pada nilai, dengan menggunakan rasionalitas nilai yang berorientasi pada tujuan, atau dengan menggunakan rasionalitas instrumental, maka pada saat inilah tindakan itu dinilai efektif. Dalam hal itu, ketika keputusan umat Islam memilih meninggalkan partai Islam dan beralih pada partai Nasionalis, menandakan ada alasan yang lebih rasional yang mendorong mereka untuk percaya pada partai Nasionalis.

Besarnya porsi pertimbangan pilihan politik pada kredibilitas; kapabilitas dan kinerja ketimbang agama adalah hasil dari proses rasionalisasi mereka terhadap partai Islam. Peralihan dari pertimbangan ideologi (agama) ke pertimbangan teknis dan material dalam pilihan politik, menandakan rasionalisasi yang terjadi adalah bagian dari kesadaran individual dan perlahan menjadi kesadaran kolektif. Mengutip Weber (2006) rasionalisasi menuntut adanya pengaliran emosi kepada ruang publik, yang dengan sendirinya mengakibatkan pengurangan intensitas pada penyandaran immaterial dalam tindakan. Kekalahan partai Islam tidak otomatis atau “determinan” karena pragmatisme pemilih, tetapi juga disebabkan oleh kredibilitas, kapabilitas dan kinerja partai Islam itu sendiri. Menurunnya kredibilitas partai

Islam menjadi faktor deterministik bagi kekalahan partai Islam. Buruknya kapabilitas dan kinerja ditambah dengan perubahan sistem pemilu kian memperparah posisi partai Islam. Ketiga faktor inilah yang saling berhubungan mendorong kekalahan partai Islam. Kepercayaan dari konstituen bagi partai politik bagaikan bahan bakar yang menggerakkan lokomotif partai. Eksistensi; keberlanjutan; dan kejayaan partai seutuhnya tergantung pada tingkat kepercayaan konstituen. Ironisnya, partai Islam tidak mampu menjaga kepercayaan konstituennya karena diperburuk oleh kualitas kinerja membuat partai Islam tidak mampu bersaing dengan partai Nasionalis. Kini, umat Islam mengevaluasi pilihan politik mereka melalui perasaan dan pengamatan yang intens terhadap *track record* partai Islam. Mereka tidak hanya menilai, tetapi juga merasakan “seberapa nyaman dan yakin mereka” dengan imej yang ditawarkan partai Islam. Kini semuanya terjawab sudah, ternyata partai Islam tidak mampu mempertahankan kualitas politik mereka. Akibatnya, kepercayaan masyarakat turun drastis, tidak ayal jika akhirnya partai Islam kalah dalam pemilu belakangan ini (baca Pemilu tahun; 2004 dan 2009). Luruhnya kepercayaan ini mengukuhkan bahwa ada degradasi kualitas yang ditunjukkan partai Islam di Sumatera Barat.

### **Islam Politik yang Tergadaikan: Sebuah Catatan Penutup**

Hadirnya partai Islam di Sumatera Barat telah membawa dinamika baru di dalam struktur sosial-politik etnik muslim Minangkabau. Akibat

dari perubahan iklim dan perluasan skala politik pasca Indonesia meretas reformasi, partai Islam tidak saja meramaikan pasar politik, tetapi juga mendorong umat Islam di Sumatera Barat bertindak dan memilih lebih rasional, ketimbang sebelum hadirnya partai Islam.

Islam dan umat Islam di Sumatera Barat telah berkontribusi besar terhadap demokrasi politik di Indonesia. Besarnya jumlah pemilih muslim di Sumatera Barat berkorelasi positif dengan perkembangan demokrasi politik di Indonesia. Akan tetapi, besarnya jumlah konstituen yang beragama Islam tidak paralel dan simetris dengan pilihan politik mereka. Naiknya angka *absentia voters* (Golput), dan kalahnya partai berbasis Islam (PPP, PKS, PBB, PBR, dan PAN) pada pemilu legislatif 2009 menggambarkan betapa tidak berkorelasinya antara Islam dengan pilihan politik umat Islam. Namun demikian, fakta ini tidak dapat direduksi bahwa di tengah-tengah masyarakat Muslim Sumatera Barat kini tengah berlangsung proses “sekularisasi” antara domain agama sebagai hal yang sakral-transedental dengan ranah politik profan-pragmatik. Pergeseran pilihan politik dari politik identitas ke politik rasional tidak tepat dikatakan bahwa masyarakat telah terjebak pada kepentingan pragmatisme-material. Tidak dominannya agama mempengaruhi pilihan politik masyarakat pada pemilu 2009 lantaran ada kekuatan lain selain agama, yakni kapabilitas, kinerja dan ikatan primordial. Peralihan dari pertimbangan agama ke pertimbangan teknis dan material, selain menandakan rasionalisasi yang intens dalam masyarakat, juga mengindikasikan



sebagai sebuah resiprokal atas Islam Politik.

Menguatnya kekuatan rasionalitas masyarakat dalam membaca dan memaknai relasi agama dengan politik, lebih disebabkan Islam politik tidak mampu memelihara kepercayaan konstituen. Selain itu Islam politik tak kunjung mampu menjadi kekuatan transformatif, dimana Islam yang seyogyanya dijadikan sebagai *models for reality*, namun yang terjadi justru sebaliknya, Islam dijadikan sebagai *models of reality*<sup>21</sup>. Sebagai eksensya masyarakat merekonstruksi pemaknaan baru terhadap Islam politik; Islam dan keberislaman bagi mereka bukanlah identik dengan Islam Politik dan Islam Simbolik sebagaimana Islamnya partai politik, melainkan Islam Substantif yang menekankan bagaimana Islam tidak hanya menjadi landasan moral (*moral base*) tetapi juga menjadi kekuatan sosial (*social force*) yang mampu menggerakkan perubahan.

Padamulanya, masyarakat meyakini bahwa partai Islam dengan mengukung Islam sebagai landasan ideologis akan mampu merubah wajah politik dan demokrasi lebih baik. Sederhananya, umat Islam berpandangan bahwa Islam harus mampu mewarnai, bukan sebaliknya terwarnai oleh kusut-masai perwajahan politik Indonesia. Namun faktanya partai Islam tidak

mampu menunjukkan bentuk dan perilaku ideal sesuai dengan bingkai dan paradigma Islam. Dalam konteks inilah dapat dimengerti mengapa terjadi reposisi atau keterjarakan agama di ranah politik antara Islam Simbolik dengan Islam Substantif; Partai Islam dengan pilihan politik umat Islam. Oleh karena Islam dimaknai sebagai fakta normatif (*normative fact*) yakni semangat yang menyusun struktur sosial jauh melampaui simbol karena ia adalah hal yang substantif, maka kekuatan rasionalitas menjadi keniscayaan dan pilihan utama bagi pemilih dibanding ikatan ideologis keagamaan. Dengan demikian keyakinan agama dan kepercayaan politik bukanlah dua sisi mata uang yang memiliki hubungan afinitas-integratif, melainkan hubungan yang lebih bersifat kohesi-dialektik.

Dalam kerangka inilah kemudian dapat dimafhumi, meskipun umat Islam menghendaki agama terlibat dalam arena politik, namun keberagamaan seseorang tidak dapat diukur dengan sikap atau pilihan politik yang diambil. Dan bagi umat Islam pilihan politik bukanlah merepresantasikan sikap keberagamaan mereka<sup>22</sup>. Karena memang agama dalam konteks ini sebenarnya tidak memiliki korelasi positif dengan memilih partai atau caleg tertentu. Atas alasan ini pulalah kemudian muncul sikap bahwa seorang

---

<sup>21</sup>. Islam sebagai *models of reality*; sebagai Islam yang konkrit, Islam yang wujud berbentuk dalam kehidupan sosial, keseharian masyarakat. Sedangkan Islam sebagai *models for reality* adalah nilai-nilai etis, bersifat normatif. Ini seharusnya menjadi landasan dari kehidupan manusia, terutama umat Islam. Ia tidak saja menjadi standar, tetapi juga menjadi pembentuk kehidupan; keseharian umat Islam. Lihat dalam Bassam Tibi, *Islam between Culture and Politics*, (New York: Palgrave McMillan, 2001), hal. 28.

---

<sup>22</sup>. 47,73% memilih berkeyakinan bahwa keberagamaan seseorang tidak ditentukan dari partai apa yang ia pilih. Hanya 18,18% yang masih berpandangan partai apa yang dipilih mencerminkan tingkat keberagamaan. Dalam konteks ini, baik PNS (+50,00% dan -27,78%), pedagang (+48,78% dan -14,63%), petani (+44,83% dan -16,38%, dan elit (+43,48% dan -26,09%) berkeyakinan keberagamaan tidak tercermin dari partai apa yang dipilih. Sementara buruh berada dalam posisi imbang (+27,78% dan -27,78%).

Muslim tidak mesti memilih partai Islam. Apa yang terjadi akibat ketidakmampuan partai Islam menjadikan agama sebagai representasi dari tindakan politik mereka adalah muncul stereotipe bahwa simbol-simbol agama yang digunakan tidak lain hanyalah sebagai “magnitud” atau penarik kepercayaan, bukan didasarkan pada keinginan untuk membela dan membumikan nilai-nilai agama dalam politik. Dan dari sisi inilah masyarakat melihat Islam hanya dijadikan sebagai alat politik untuk berkuasa<sup>23</sup>.

<sup>23</sup>. Jika petani (63,33%), pedagang (60,98%), dan buruh (50,00%) berkeyakinan bahwa penggunaan simbol-simbol agama oleh partai Islam hanya sekadar menarik perhatian dan merebut kepercayaan umat Islam, jelas ini bukanlah hal yang berlebihan dan mengada-ada. Anehnya, elit (65,22%) dan PNS (50,00%) pun meyakini betul bahwa partai Islam hanya mengedepankan politik simbolik untuk memuluskan kepentingan partai Islam. Limbak dari itu, bukanlah hal yang berlebihan jika kemudian pemilih Muslim mempersepsi Islam hanya dijadikan alat politik. Hal ini terlihat jelas, 73,11% pemilih Muslim di Sumatera Barat; petani (68,10%), buruh (66,67%), pedagang (85,37%), PNS (69,44%), dan elit (43,48) berkeyakinan bahwa partai Islam secara utuh hanya mempolitisir Islam sebagai alat politik untuk berkuasa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- . 2000. Sebuah Diktum Keramat Dalam Sejarah Intelektual Minangkabau (makalah seminar ABS-SBK).
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hutchinson, France., et.al. 2002. *The Politics of Money: Towards Sustainability and Economic Democracy*. London: Pluto Press.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Robert W. Hefner. 2000. *Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia*. New Jersey: Princeton University Press.
- Dobbin, Christine. 2008. *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy; Central Sumatera 1784-1847*, Terj. Lilian d. Tedjasudhana. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Efendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Pemikiran Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fromm, Erich. 2004. *Akar Kekerasan; Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. 2005. *Memahami*

- Negativitas: Diskursus tentang Massa, Teror, dan Trauma*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Jhonson, Doyle Paul. 1994. *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*, diterjemahkan dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan)
- , 2007, *Dialektika Islam; Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Sedgwick, Mark. 2006. *Islam & Muslims: A Guide to Diverse Experience in a Modern World*. Boston: Intercultural Press.
- Sobary, Mohammad. 1996. *Kebudayaan Rakyat: Dimensi Politik dan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Banteng.
- Sukma, Rizal, 2003, *Islam in Indonesia Foreign Policy*, New York: Routledge.
- Tibi, Bassam, 2001. *Islam between Culture and Politics*, New York: Palgrave McMillan
- Weber, Max. 2006. *From Max Weber; Essay in Sociology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD di Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 dan 2009 KPU Provinsi Sumatera Barat